

**PENGARUH REMUNERASI LEWAT PROGRAM REFORMASI
BIROKRASI PADA DISIPLIN PEGAWAI KANTOR
WILAYAH II DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**KHAIRUNSYAH
NIM : 07 832 0077**



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

UNIVERSITAS MEDAN AREA 2009

Judul Skripsi : Pengaruh Remunerasi Lewat Program Reformasi Biroktasi
Pada Disiplin Pegawai Kantor Wilayah II Direktorat
Jenderat Kekayaan Negara Medan

Nama Mahasiswa : **KHAIRUNSYAH**

No. Stambuk : 07 832 0077

Jurusan : Manajemen

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. Ir. H. Zulkarnain Lubis, MS, PhD)

(Ihsan Effendi, SE, MSi)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

(Ihsan Effendi, SE, MSi)

(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)

Tanggal Lulus : 17 Oktober 2009

ABSTRAK

KHAIRUNSYAH. Pengaruh Remunerasi Lewat Program Reformasi Birokrasi pada Disiplin Pegawai Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan. Skripsi, tahun 2009.

Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan mencakup penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia. Penataan organisasi meliputi modernisasi dan pemisahan, penggabungan kerja penajaman fungsi. Perbaikan proses bisnis meliputi analisa dan evaluasi jabatan, analisa beban kerja, dan penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)*. Sementara peningkatan SDM meliputi penyelenggaraan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi, pembangunan *assessment centre*, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

Sehubungan dengan remunerasi yang berupa penataan kembali TKPKN dalam program reformasi birokrasi, maka penulis tertarik untuk mengaitkannya dengan pengaruh pada disiplin pegawai negeri sipil khususnya di salah satu kantor vertikal Departemen Keuangan yakni Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah remunerasi lewat program Reformasi Birokrasi mempunyai pengaruh terhadap disiplin pegawai Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan.

Teknik sampling menggunakan *probability sample* dengan jenisnya yaitu berstrata proporsional (*Proportional Stratified Sampling*) dikarenakan teknik ini dianggap paling cocok untuk mewakili populasi objek yang akan diteliti yang memiliki strata berupa jabatan struktural. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang mewakili dari eselon II, eselon III, eselon IV dan pelaksana yang berjumlah sebanyak 17 orang.

Analisa data dengan menggunakan analisa Korelasi Rank Spearman untuk menentukan hubungan antara kedua variabel yaitu variabel bebas (tunjangan) dan variabel terikat (disiplin), kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan program SPSS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tunjangan dengan disiplin adalah sebesar -0,318, dan dengan menggunakan pengujian hipotesis juga menunjukkan tidak adanya hubungan positif antara variabel tunjangan dengan variabel disiplin.

Dari hasil penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan agar diperoleh hasil mengenai faktor lain yang memiliki pengaruh positif terhadap disiplin pegawai pada Kanwil II DJKN Medan

Kata Kunci : Tunjangan, Disiplin



KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pengaruh Remunerasi lewat Program Reformasi Birokrasi pada Disiplin pegawai Kanwil II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Medan”

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh segala saran, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak dan sudah sepatutnya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Zulkarnain Lubis, MS, PhD, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Bapak Ihsan Effendi, SE, MSi, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Dosen Pembimbing II atas segala saran, bimbingan serta nasihatnya dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Universitas Medan Area Jurusan Manajemen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan;

5. Ucapan terima kasih disampaikan kepada kepala kantor dan pegawai Kanwil II DJKN Medan, kepala Subbagian Keuangan yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini;
6. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada isteri tercinta Dona Andriyani yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan sejak awal kuliah sampai dengan selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran guna perbaikan penulisan skripsi ini sangat diharapkan penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan dan Allah SWT selalu merelunati kita, amin!

Medan, Oktober 2009
Penulis



Kbairnsyah

Dari hasil penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan agar diperoleh hasil mengenai faktor lain yang memiliki pengaruh positif terhadap disiplin pegawai pada Kanwil II DJKN Medan

Kata Kunci : Tunjangan, Disiplin



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Remunerasi.....	9
1. Pengertian Tunjangan.....	9
2. Tujuan Tunjangan.....	10
3. Prinsip-Prinsip Program Tunjangan.....	11
4. Strategi Tunjangan.....	12
5. Jenis-jenis Tunjangan.....	12

6. Remunerasi di Departemen Keuangan.....	14
B. Reformasi Birokrasi.....	16
1. Pengertian Reformasi Birokrasi.....	16
2. Tujuan Reformasi Birokrasi	17
3.Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan.....	18
C. Disiplin.....	19
1. Pengertian Disiplin.....	19
2. Tujuan Pembinaan Disiplin Kerja.....	22
3. Jenis Disiplin Kerja.....	24
4. Pendekatan Disiplin.....	26
5. Pelaksanaan Sanksi Disiplin.....	30
6. Teknik-teknik Pelaksanaan Disiplin.....	33
7.Disiplin di Instansi Pemerintahan.....	34
D. Analisa Pengaruh Remunerasi dengan Disiplin Pegawai.....	40
E. Hipotesis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
B. Jenis dan Sumber Data.....	42
C. Variabel Penelitian.....	42
D. Populasi dan Sampel.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45

	F. Analisis Data.....	45
BAB IV	ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	49
	A. Gambaran Umum Pegawai.....	49
	B. Analisa Pemberian Remunerasi pada Pegawai Kanwil II DJKN Medan	53
	C. Analisa Disiplin Pegawai Kanwil II DJKN Medan	56
	D. Analisa Antara Tunjangan terhadap Disiplin Pegawai Kanwil II DJKN Medan.....	60
	1. Analisa Korelasi Rank Spearman.....	61
	2. Hipotesis	64
	E. Pembahasan atas Hasil Analisa Antara Tunjangan terhadap Disiplin Pegawai Kanwil II DJKN Medan.....	65
	1. Pembahasan atas Hasil Analisa Korelasi Rank Spearman.....	65
	2. Pembahasan atas Hasil Hipotesis	71
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	74
	A. Kesimpulan.....	74
	B. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	LAMPIRAN.....	80
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 : Struktur Peringkat Jabatan di Departemen Keuangan.....	16
Tabel 3.1 : Operasional Variabel.....	43
Tabel 3.2 : Pedoman untuk memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi.....	46
Tabel 4.1 : Distribusi Populasi berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.2 : Distribusi Populasi berdasarkan Status Perkawinan.....	50
Tabel 4.3 : Distribusi Populasi berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4.4 : Distribusi Populasi berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
Tabel 4.5 : Distribusi Populasi berdasarkan Jumlah Keluarga yang Ditanggung.....	51
Tabel 4.6 : Distribusi Populasi berdasarkan Lama Bekerja di Kantor.....	52
Tabel 4.7 : Indikator Penentuan Pemberian Tunjangan.....	54
Tabel 4.8 : Indikator Metode Pembayaran.....	55
Tabel 4.9 : Indikator Pemenuhan Kebutuhan Hidup.....	55
Tabel 4.10 : Indikator Ketepatan Waktu.....	56
Tabel 4.11 : Indikator Kemampuan Memanfaatkan dan Menggunakan Perlengkapan.....	57
Tabel 4.12 : Indikator Hasil Pekerjaan.....	58
Tabel 4.13 : Indikator Kepatuhan pada Peraturan.....	58

Tabel 4.14	:	Indikator Tanggung Jawab.....	59
Tabel 4.15	:	Prosentase Jawaban Seluruh Indikator.....	60
Tabel 4.16	:	Skala Perhitungan Kuisisioner.....	61
Tabel 4.17	:	Perhitungan Rank Spearman atas 2 Variabel.....	62
Tabel 4.18	:	Perhitungan Korelasi Rank Spearman atas Indikator- indikator Variabel Tunjangan dan Variabel Disiplin.....	63



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 : Prosedur Disiplin Progresif.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 : Kuisisioner bagi Pegawai Kanwil II DJKN Medan.....	80
Lampiran 2 : Hasil Kuisisioner Pengaruh Remunerasi Lewat Program Reformasi Birokrasi pada Disiplin Pegawai Kanwil II DJKN Medan.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan reformasi yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998, berbagai tuntutan masyarakat selalu mengemuka agar berbagai kegiatan kenegaraan direformasi. Reformasi itu meliputi berbagai bidang termasuk birokrasi-alat pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan kegiatan lainnya. Setelah hampir satu dasawarsa berjalan, masyarakat belum merasakan reformasi birokrasi di instansi pemerintah secara nyata.

Reformasi birokrasi mendorong agar adanya percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai alat pemerintah dituntut agar bekerja lebih profesional, bernozal, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pada Kabinet Indonesia Bersatu pembenahan birokrasi mencapai penampilan yang tinggi, dengan melakukan reformasi birokrasi untuk mencapai layanan publik yang baik, daya aparatur, kelembagaan, tata laksana, akuntabilitas, mendapat dukungan penuh dari kabinet ini. Pokok-pokok Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang akan dilakukan menurut Effendi (2007) yakni harus dimulai dari penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur. Langkah selanjutnya adalah membuat mekanisme tidak berbelit-belit, menegakkan akuntabilitas aparatur.

meningkatkan dan menciptakan pengawasan yang komprehensif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang berkualitas dan prima.

Reformasi birokrasi perlu diprioritaskan pada unit-unit kerja pelayanan publik seperti imigrasi, bea cukai, pajak, pertanahan, kepolisian, kejaksaan, pemerintahan daerah dan pada institusi atau instansi pemerintah yang rawan KKN, seperti pemerintah pusat/daerah, kepolisian, kejaksaan, legislatif, yudikatif, dan departemen dengan anggaran besar seperti departemen pendidikan, departemen agama, dan departemen pekerjaan umum.

Kementerian PAN telah menganalisis reformasi birokrasi pemerintahan dan mengidentifikasi Pokok-pokok Pikiran Tentang Reformasi Birokrasi Aparatur Negara (kajian Kedeputan Menpan Bidang Program tahun 2003-2004) berupa (Effendi, 2007) kelembagaan organisasi, sumber daya manusia sebagai aparatur, tata laksana atau manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja yang produktif, efisien dan efektif, selanjutnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dari program dan pelaksanaannya, serta yang terakhir adalah *best practice* dari daerah yang telah berhasil menjalankan reformasi birokrasi.

Untuk itu, Departemen Keuangan sebagai salah satu lembaga negara/pemerintah juga telah menyusun, mendesain dan melaksanakan reformasi birokrasi di unit kerja lingkungan Departemen Keuangan. Adapun yang menjadi latar belakang internal Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan (dikutip dari Liberti dan Rayendra, 2008) adalah bahwa departemen keuangan merupakan departemen yang strategis karena hampir seluruh aspek kegiatan perekonomian negara

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator, **Inilah Formula Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso**, (<http://www.isiindonesia.com/inilah-formula-kapolri-jenderal-polisi-bambang-hendarso.html>, tanggal 10 Februari 2009), 2009.
- Administrator, **Pengakuan Disiplin di Departemen Keuangan** (<http://www.reform.depkeu.go.id/>), 2007.
- Administrator, **Forum Informasi Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan** (<http://www.reform.depkeu.go.id/>), 2007.
- Administrator. **Kajian sistem Remunerasi PNS** http://aparaturnegara.bappenas.go.id/data/Kajian/Kajian2003/remunerasi/Kajian_Sistem_Remunerasi_PNS.pdf, 2003.
- Azizy, Ahmad Qodri Abdillah dan Kristiawan, S., Andry, 2007. **Change Management dalam Reformasi Birokrasi**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Davis, Keith, dan Newstrom, W. John., **Perilaku Dalam Organisasi**, terjemahan, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Dessler, Garry, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, terjemahan, Prenhalindo, Yakarta, 1998.
- Effendi, Taufiq. Drs., MBA., **Agenda Strategis Reformasi Birokrasi menuju Good Governance**. (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=54 tanggal 09 Februari 2007), 2007.
- Flippo, B. Edwin, **Manajemen Personalia**, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Handoko, T. Hani, **Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia**, Edisi kedua, BPFE, Yogyakarta. 1998.
- Hariandja, Marihot Tua Effendi, Drs. M.si., **Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai**, Graznido, Jakarta, 2002.
- Hasibuan, H. Malayu, S.P., **Manajemen Sumber Daya Manusia : Dasar dan Kunci Keberhasilan**, Gunung Agung, Jakarta, 1997.

Hasibuan, H. Malayu, S.P., **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 tentang **Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia**.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang **Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan**.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KMK.01/2007 tentang **Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pusat Departemen Keuangan**.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.289/KMK.01/2007 tentang **Peringkat Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan**.

Malo, Manasse, dkk., **Metode Penelitian Sosial**, Modul 1-5, Karinika, Jakarta, 1986.

Mangkunegara, Anwar Prabu, **Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

Mathis, Robert, L., dan Jackson, John, H., **Manajemen Sumber Daya Manusia**, terjemahan, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

Moekijat, **Manajemen Sumber Daya Manusia : Manajemen Kepegawaian**, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Notoadmodjo, Soekidjo, **Pengembangan Sumber Daya Manusia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Pandiangan, Liberti, dan Toruan, L., Rayendra. **Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan Undang-Undang terbaru**, 2008.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang **Pedoman Umum Reformasi Birokrasi**.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang **Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176)**

Pomadi, **Upaya Meningkatkan Kinerja PNS** (<http://pomadi-simbolon.blogspot.com/2008/06/up>), diakses 16 Juni 2008.

- Sastrohadiwiryono, B., Siswanto, **Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional**, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Saydam, Gouzali, **Kamus Istilah Kepegawaian**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Siagian, P., Sondang, **Fungsi-fungsi Manajerial**. Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Simamora, Henry, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Edisi Kedua, STIE YKPN, Yogyakarta, 1997.
- Simamora, Henry, **Akuntansi Manajemen**, Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- Singarimbun, Masri, **Metode dan Proses Penelitian**. Dalam Singarimbun, Masri dan Dofian Efendi, **Edisi Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Soesatro, Hadi, **Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir**, Jakarta, Kanisius, Jakarta, 2005.
- Sugiyono, Drs., **Statistika dan Penelitian**, CV. Alfabeta, Bandung, 1997.
- Sugiyono, Drs., **Memahami Penelitian Kualitatif**, CV. Alfabeta, Bandung 2005
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor :SE-99/SJ/2000 Tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara.
- Mark, Turner, & David, Hulme, **Governance, Administration, and Development**. London, Macmillan Limited Press. 1997.
- TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025.